

**OPTIMALISASI PENDAPATAN PAJAK REKLAME
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MOROWALI**

Tegar Muhammad Syah Pahlevi
Ighars016@gmail.com
Keuangan Publik
Fakultas Manajemen Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Dosen Pembimbing : Ayu Widowati Johannes, S.STP., M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Original Regional Income (PAD) is one of the main sources for Morowali district in financing development and public services. One potential that has not been fully explored is income from advertising taxes. **Objective:** This research aims to describe the optimization of advertising tax revenue in Morowali Regency, analyze inhibiting factors, and also describe the efforts of the Morowali Regency Regional Revenue Agency in overcoming problems. **Method:** This research method uses descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique in this research uses non-probability sampling to select respondents. Data collection was carried out by means of observation and interviews. **Results:** The results obtained in this research are that the optimization of advertising tax revenue in Morowali Regency has been implemented well and the targets produced by Morowali Regency can still be improved further. Efforts to improve the tax base are carried out by the Regional Revenue Agency of Morowali Regency in an economic context, with a focus on strategies to increase tax revenues at predetermined tax rates. **Conclusion:** The conclusion obtained in this research is that advertising tax revenues in Morowali Regency are running optimally, although in implementation there are still several indicators that need to be improved. The author's suggestion in this research is to increase and improve Human Resources to facilitate the tax collection process and further increase public participation in the tax collection process to make it more transparent.

Keywords: optimization, advertising tax, local revenue

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber utama bagi kabupaten Morowali dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu potensi yang belum maksimal dieksplorasi adalah pendapatan dari pajak reklame. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan optimalisasi pendapatan pajak reklame di Kabupaten Morowali, menganalisis faktor-faktor penghambat, juga mendeskripsikan upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali dalam mengatasi permasalahan. **Metode:** Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan Induktif. Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan non-probability sampling untuk memilih responden. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. **Hasil/Temuan:** Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah optimalisasi pendapatan pajak reklame di Kabupaten Morowali telah terlaksana dengan baik dan target yang dihasilkan oleh Kabupaten Morowali masih dapat ditingkatkan lagi. Upaya perbaikan basis perpajakan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali dalam konteks perekonomian, dengan fokus pada strategi peningkatan penerimaan pajak dengan tarif pajak yang telah ditentukan. **Kesimpulan:** Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini ialah pendapatan pajak reklame di Kabupaten Morowali sepenuhnya berjalan dengan optimal, walaupun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Saran penulis dalam penelitian ini ialah menambah dan meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk memudahkan dalam proses pemungutan pajak serta lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemungutan pajak agar lebih transparan.

Kata Kunci : optimalisasi, pajak reklame, pendapatan asli daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kesatuan yang kaya akan sumber daya alam, berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi alam tersebut dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan hak otonomi kepada daerah untuk mengelola wilayahnya demi mencapai pemerintahan yang demokratis dan adil. Dengan otonomi ini, daerah diberi wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Ini berarti setiap daerah harus mandiri dalam mengelola pendapatan dan pembiayaannya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari pajak, retribusi, dan pengelolaan sumber daya alam lokal.

Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah adalah contoh daerah dengan potensi PAD yang besar. Pasal (4) ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencakup berbagai jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, dan lainnya. Pajak reklame, khususnya, memiliki peran penting dalam kontribusi pendapatan daerah. Dengan bertambahnya jumlah industri dan bisnis di Kabupaten Morowali, keberadaan reklame di ruang publik meningkat pesat. Potensi pendapatan dari pajak reklame ini sangat besar dan dapat menjadi sumber PAD yang signifikan untuk mendukung pembangunan daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pemerintah daerah diharapkan mampu lebih mandiri. Namun, sekarang masih banyak masalah yang ditemui oleh pemerintah daerah berkaitan usaha meningkatkan pendapatan daerah. Mardiasmo (2009)

Namun, berbagai kendala menghambat optimalisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Morowali. Dari sisi administrasi, masih ada tantangan dalam sistem pendataan dan penagihan pajak yang efektif. Kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak reklame juga masih rendah, sehingga perlu adanya upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif. Selain itu, tingkat pengawasan oleh aparat pemerintah terhadap pengelolaan pendapatan pajak reklame perlu ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan.

Penelitian ini berfokus pada upaya optimalisasi pendapatan pajak reklame di Kabupaten Morowali dengan merinci permasalahan dan hambatan yang ada serta memberikan solusi dan rekomendasi kebijakan. Misalnya, perlu diterapkan sistem pendataan yang lebih modern dan terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam administrasi pajak, serta strategi sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pengawasan yang lebih ketat dan transparan juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap potensi pendapatan dari pajak reklame dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan Kabupaten Morowali dapat meraih potensi penuh dari sektor pajak reklame sebagai sumber pendapatan yang signifikan. Optimalisasi pendapatan dari pajak reklame akan berdampak positif terhadap PAD Kabupaten Morowali, mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Melalui pengelolaan yang efektif dan efisien, Kabupaten Morowali dapat menjadi model bagi daerah lain dalam memanfaatkan potensi pajak reklame untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Morowali, sebagai salah satu kabupaten yang berkembang di Indonesia, memiliki potensi besar dalam pengumpulan pajak reklame. Pengaruh pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Morowali menjadi topik yang relevan untuk diteliti guna memahami sejauh mana kontribusi pajak ini terhadap pembangunan daerah.

Kabupaten Morowali dibagi menjadi 9 kecamatan, yaitu: Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya, dan Kecamatan Witaponda. Pajak reklame merupakan salah satu pendapatan asli daerah di Kabupaten morowali yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten morowali. Kemajuan pembangunan dan teknologi serta informasi di Kabupaten morowali disertai dengan pesatnya pertumbuhan sektor industri menjadikan reklame salah satu media yang efektif dan efisien dalam melakukan promosi dan pengenalan terhadap produk suatu industri. Sebagaimana menurut Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah bahwasannya Pejabat atau petugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali yang sudah ditunjuk untuk menetapkan besaran pajak terutang pada besaran pajak sebagaimana yang ditentukan perundang undangan yang mengatur melalui pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali telah mendata jumlah wajib pajak reklame Kabupaten Morowali Perkecamatan sebagai berikut :

Data Jumlah Wajib Pajak Reklame Kabupaten Morowali Perkecamatan Tahun 2023

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH REKLAME	TOTAL PENDAPATAN
1	WITAPONDA	81	Rp. 66.329.100
2	BUMIRAYA	96	Rp. 44.787.840
3	BUNGKU BARAT	129	Rp. 75.215.340
4	BUNGKU TENGAH	198	Rp. 295.078.725
5	BUNGKU TIMUR	93	Rp. 70.356.600

6	BUNGKU PESISIR	24	Rp. 18.583.200
7	BAHODOPI	207	Rp. 584.843.481
8	BUNGKU SELATAN	3	Rp. 1.050.000
9	MENUI KEPULAUAN	9	Rp. 3.981.000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali

Tabel diatas merupakan Besaran jumlah pendapatan pajak reklame perkecamatan di Kabupaten Morowali. Dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pajak reklame di Kabupaten Morowali bahwasannya presentase dari pemasukan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali masih terbilang kecil yaitu masih dibawah 1% daripada pemasukan pajak lainnya, akan tetapi dari angka jumlah pendapatan pajak reklame tidak dapat di anggap remeh karena bagi Pemerintah Kabupaten Morowali sebagai salah satu Kabupaten yang berkembang itu sangatlah penting terhadap Pembangunan Kabupaten Morowali sendiri kedepannya. Upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali dalam mengidentifikasi pembayaran pajak baru atau potensial serta jumlah wajib pajak yang diteliti oleh penulis menunjukkan bahwasannya Pemerintah Kabupaten Morowali masih kurang optimal dalam mendata serta melakukan pencacatan terhadap reklame di daerah-daerah pelosok. Walaupun dalam upayanya Pemerintah Kabupaten Morowali menggunakan berbagai metode dan strategi untuk mencapai tujuan serta hasil yang optimal, akan tetapi pemerintah Kabupaten Morowali selalu saja menghadapi berbagai hambatan dan masalah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali dengan mengoptimalkan pendapatan pajak reklame. Ria Ariani Prasetyo, Endang Masitoh, & Riana Dewi (2017) yang berjudul Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Karanganyar (Ria Ariani Prasetyo, Endang Masitoh, & Riana Dewi 2017) membuktikan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak reklame, sedangkan jumlah penduduk dan jumlah industri tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame, secara bersama-sama jumlah penduduk, jumlah industri dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak reklame. Penelitian (Uly & Fajriana, 2019) berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Palembang Tahun 2013- 2017 menemukan bahwa Pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak reklame, sedangkan PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Penelitian (Arge, 2018) berjudul analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Yogyakarta Tahun 2001- 2015 membuktikan bahwa Jumlah Penduduk, Jumlah Industri, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak reklame di kota Yogyakarta sedangkan jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di kota Yogyakarta. Penelitian (Wijayanti et al., 2018) berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang (Studi Kasus di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang). Penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak reklame di kota malang pada tahun 2012 hingga 2016 dikategorikan sangat efektif. Kontribusi pajak reklame terhadap PAD setiap tahun sangat kurang. Penelitian (Ramadan, 2017) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan hasil penelitian Jumlah penduduk dan jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame, sedangkan PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Penelitian (Mariz, Andung

Kurnia, 2011) yang berjudul Optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame Dalam Kaitannya dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro. Penelitian (Mukti, Rakhman, 2010). Dengan judul Optimalisasi pemungutan pajak reklame sebagai upaya untuk memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Malang. Penelitian (Cahyati, Annisa Fatin Nur, 2023) yang berjudul Optimalisasi pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi. Penelitian (Keuis Rahmayanti, 2019) dengan judul Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Banjar. Dan Penelitian (Tanti Afrijayanti, 2023) dengan judul Optimalisasi Potensi Pajak Reklame Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Optimalisasi Pendapatan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni teori (Sutedi 2008).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan optimalisasi pendapatan pajak reklame di Kabupaten Morowali, menganalisis faktor- faktor penghambat, juga mendeskripsikan upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali dalam mengatasi permasalahan.

II METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penulis mengumpulkan data dengan teknik *Triangulasi* karena teknik ini dianggap dapat untuk memperoleh data yang valid dan sesuai. Adapun informan penelitian yang dipilih dengan *semistructured interview* terdiri atas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali, Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali, Kepala Bidang Pelaksanaan dan Penetapan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali, Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali, Kepala Subbidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali, dan 2 orang yang membayar wajib pajak. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa wawancara semi terstruktur dan observasi nonpartisipasi. Menurut Sugiyono (2011:1) penelitian diartikan sebagai suatu cara ilmiah dalam memperoleh data yang bertujuan dan fungsi tertentu. Menurut hal itu ada 4 kata kunci yang harus dicermati yakni, cara kegunaan, ilmiah, tujuan, dan data. Cara ilmiah artinya aktifitas penelitian tersebut dilaksanakan bercirikan keilmuan, antara lain sistematis, empiris, dan rasional. Menurut Nazir (2014:5) penelitian adalah sebuah penyelidikan yang terorganisasi. Adapun analisisnya menggunakan pendapat Sutedi 2009 mengenai teori Optimalisasi. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan Teknik analisis data oleh Creswell & Winter (2018:265) yakni, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penulis menggunakan pendekatan induktif dalam melaksanakan penelitian ini. Menurut Arikunto (2012:32) pengertian pendekatan induktif mempunyai inti bahwa pendekatan induktif adalah sebuah konsep pengembangan berdasarkan adanya data, menurut desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Sutedi (2008) menyatakan bahwa mengatakan bahwa cara optimalisasi

intensifikasi pemungutan pajak daerah adalah dengan cara memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan basis pada penerimaan. Menurut Purwadarminta merujuk pada KBBI pajak sebagai iuran yang wajib dibayar sebagai sumbangan kepada negara (provinsi, kota/kabupaten, dan sebagainya), ada banyak macamnya menurut apa yang dipakai dasar pemungutan iuran itu, seperti tanah (bumi), jalan, kekayaan, kendaraan, Pembangunan, pendapatan, penghasilan, pencarian, peralihan, perseroan, radio, tontonan, upah dan sebagainya (Bustamar, 2017). Penulis mengangkat judul Optimalisasi Pendapatan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut:

3.1. Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali

Untuk besaran tarif pajak reklame di Kabupaten Morowali sendiri ialah sebesar 25% dari jumlah total harga reklame. Pajak reklame yang terutang harus dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Jika pajak terutang dibayar setelah jatuhnya tempo pembayaran, maka dapat mendapat denda dalam bentuk bunga keterlambatan sebesar 2% (Dua Persen) dalam satu bulan selama maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan SSPD.

Dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pajak reklame di Kabupaten Morowali bahwasannya presentase dari pemasukan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali masih terbilang kecil yaitu masih dibawah 1% daripada pemasukan pajak lainnya, akan tetapi dari angka jumlah pendapatan pajak reklame tidak dapat di anggap remeh karena bagi Pemerintah Kabupaten Morowali sebagai salah satu Kabupaten yang berkembang itu sangatlah penting terhadap Pembangunan Kabupaten Morowali sendiri kedepannya.

3.2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Dalam Optimalisasi Pendapatan Pajak Reklame

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kabupaten yang memiliki sumber daya manusia terbatas mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan identifikasi pembayaran pajak baru. Keterbatasan jumlah staf pajak dapat mempengaruhi kemampuan untuk melakukan survei atau analisis yang diperlukan untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum dieksplorasi. Kurangnya jumlah staf yang terlatih dalam bidang teknologi informasi dan pajak bisa menjadi hambatan dalam pembaruan dan pemeliharaan basis data pajak. Masyarakat di Kabupaten Morowali mungkin menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan formal maupun pelatihan terkait pajak. Kurangnya institusi pendidikan dan pelatihan yang spesifik dalam bidang perpajakan dapat menghambat upaya peningkatan kompetensi SDM pajak. Kabupaten Morowali mungkin memiliki keterbatasan dalam jumlah personel yang tersedia untuk melakukan pemeriksaan pajak. Ini bisa membuat sulit untuk melakukan pemeriksaan secara berkala dan dadakan dengan intensitas yang diinginkan.

b. Infrastruktur dan Teknologi

Keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap teknologi mungkin membuat sulit untuk mengakses data dan melakukan analisis yang diperlukan. Misalnya, akses terbatas atau jaringan yang buruk ke internet atau perangkat lunak yang diperlukan untuk analisis data. Infrastruktur yang kurang baik dan kurangnya aksesibilitas teknologi mungkin membuat proses administrasi pajak menjadi lambat dan tidak efisien. Misalnya, kurangnya akses internet yang cepat dapat menghambat penggunaan sistem perpajakan online.

c. Kesadaran Pajak yang Rendah

Masyarakat yang kurang sadar akan kewajiban pajak atau memiliki pemahaman yang minim tentang pentingnya membayar pajak dapat menghambat identifikasi potensi pajak baru. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor budaya, pendidikan, atau sosial ekonomi.

d. Keterbatasan Akses Terhadap Pendidikan dan Pelatihan

Masyarakat di Kabupaten Morowali mungkin menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan formal maupun pelatihan terkait pajak. Kurangnya institusi pendidikan dan pelatihan yang spesifik dalam bidang perpajakan dapat menghambat upaya peningkatan kompetensi SDM pajak.

e. Keterbatasan Sumber Daya Keuangan

Proses penyusunan Perda dan perubahan tarif pajak memerlukan alokasi sumber daya keuangan yang signifikan, termasuk untuk pengadaan kebutuhan teknis, konsultasi ahli, dan pelaksanaan program sosialisasi kepada masyarakat. Kabupaten Morowali menghadapi keterbatasan anggaran yang membatasi kemampuannya untuk mempercepat proses tersebut.

3.3. Upaya Dan Solusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Dalam Mengatasi Hambatan Dan Masalah Optimalisasi Pendapatan Pajak Reklame

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Dengan melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan staf pajak yang ada dalam analisis data dan teknik identifikasi potensi pajak. Kabupaten Morowali berupaya mengadakan pelatihan reguler bagi staf terkait dalam bidang teknologi informasi dan pajak untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memahami dan mengelola basis data pajak. Pemerintah daerah berupaya menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk staf perpajakan, termasuk pelatihan tentang peraturan pajak terbaru, teknologi informasi, dan keterampilan manajemen. Upaya juga perlu dilakukan untuk meningkatkan rekrutmen dan pemeliharaan staf yang berkualitas dengan memberikan insentif yang menarik dan program penghargaan kinerja.

b. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi

Dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur IT, termasuk jaringan internet dan perangkat lunak yang diperlukan untuk analisis data. Pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk meningkatkan infrastruktur yang diperlukan, seperti akses internet yang cepat dan perangkat lunak yang diperlukan untuk sistem perpajakan online. Pemerintah Daerah juga Memberikan pelatihan kepada staf tentang penggunaan teknologi yang diperlukan, serta menyediakan dukungan teknis yang diperlukan untuk memastikan sistem perpajakan berjalan lancar.

c. Peningkatan Kesadaran Pajak

Dengan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan dampaknya bagi pembangunan daerah, ataupun dengan cara menyelenggarakan program penyuluhan pajak secara rutin untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak tentang kewajiban mereka.

d. Menyediakan Akses Terhadap Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Morowali berupaya mengadakan pelatihan reguler bagi staf terkait dalam bidang teknologi informasi dan pajak untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memahami dan mengelola basis data pajak.

e. Menyediakan Sumber Daya Keuangan alternatif

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali berupaya untuk Mengidentifikasi sumber daya keuangan alternatif, seperti dana hibah atau pinjaman, untuk mendukung penyusunan Perda dan perubahan tarif pajak. Serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia melalui pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap pengeluaran.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga adalah salah satu sumber dana yang paling berpengaruh kepada daerah karena merupakan pengelolaan langsung dari potensi-potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah dan besarnya dana tergantung dari pengelolaan potensi daerah masing-masing. Pemasukan ke daerah berasal dari pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah sebelum pemasukan tambahan ke daerah. Pajak reklame merupakan salah satu pendapatan asli daerah di Kabupaten morowali yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten morowali. Kemajuan pembangunan dan teknologi serta informasi di Kabupaten morowali disertai dengan pesatnya pertumbuhan sektor industri menjadikan reklame salah satu media yang efektif dan efisien dalam melakukan promosi dan pengenalan terhadap produk suatu industry. Pemerintah Kabupaten Morowali melakukan berbagai upaya dalam mengidentifikasi pembayaran pajak baru atau potensial serta jumlah wajib pajak. Mereka menggunakan berbagai metode dan strategi untuk mencapai tujuan ini. Salah satunya adalah dengan melakukan pengumpulan dan analisis data terkait kegiatan ekonomi masyarakat, baik itu melalui lembaga keuangan, perusahaan, maupun individu. Selain itu, pemerintah Kabupaten Morowali juga melakukan pengawasan dan audit terhadap pelaksanaan pembayaran pajak yang sesuai dengan undang-undang. Salah satu cara untuk mendorong kepatuhan pajak adalah dengan memberi wajib pajak insentif atau sanksi. Pemerintah Kabupaten Morowali melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki penilaian dan menghitung kapasitas penerimaan pajak. Salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi dalam proses pengumpulan data dan informasi terkait pajak. Mereka juga bisa meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak dengan memperketat pengawasan terhadap penghindaran pajak dan tindakan ilegal lainnya. Pemerintah Kabupaten Morowali tidak dapat untuk menentukan tarif pajak reklame itu sendiri. menurut penulis juga penting bagi Pemerintah Kabupaten Morowali untuk memastikan bahwa seluruh proses penyusunan Perda dan perubahan tarif pajak dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance, termasuk akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan keadilan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas. Kabupaten Morowali, sebagai salah satu kabupaten yang berkembang di Indonesia, memiliki potensi besar dalam pengumpulan pajak reklame. Pengaruh pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Morowali menjadi topik yang relevan untuk diteliti guna memahami sejauh mana kontribusi pajak ini terhadap pembangunan daerah. Dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pajak reklame di Kabupaten Morowali dapat dilihat bahwasannya presentase dari pemasukan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali masih terbilang kecil yaitu masih dibawah 1% daripada pemasukan pajak lainnya, akan tetapi dari angka jumlah pendapatan pajak reklame tidak dapat di anggap remeh karena bagi Pemerintah Kabupaten Morowali sebagai salah satu Kabupaten yang berkembang itu sangatlah penting terhadap Pembangunan Kabupaten Morowali sendiri kedepannya.

IV. KESIMPULAN

Optimalisasi pendapatan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten morowali menurut penulis sudah terlaksana dengan optimal, akan tetapi menurut penulis pendapatan pada pajak reklame ini masih bisa lebih di tingkatkan lagi targetnya dengan mengatasi segala macam hambatan serta masalah-masalah yang terjadi. Pada proses penelitian pun tidak terdapat masalah baik dalam dimensi memperluas basis data, memperkuat proses pemungutan, dan meningkatkan pengawasan. Proses pengelolaan pajak dan retribusi melibatkan beberapa strategi. Pertama, pemerintah berupaya mempercepat perpajakan dan pengumpulan pendapatan, sehingga pemerintah dapat fokus pada pengurangan biaya dan optimalisasi pendapatan. Kedua, pemerintah berupaya meningkatkan pengelolaan sumber daya

manusia (SDM) dengan mendorong pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Faktor-faktor hambatan serta masalah yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Kabupaten Morowali dalam mengoptimisasi pendapatan pajak reklame di Kabupaten Morowali yakni : Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Teknologi, Kesadaran Pajak yang Rendah, Keterbatasan Akses Terhadap Pendidikan dan Pelatihan, Kurangnya Incentive untuk Meningkatkan Kompetensi, Faktor Lingkungan dan Sosial, Kultur Penegakan Hukum yang Lemah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Morowali untuk mengatasi hambatan serta masalah dalam mengoptimisasi pendapatan pajak reklame di Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut : Pelatihan dan pengembangan Masyarakat, Peningkatan fasilitas teknologi dan jaringan internet, Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak dan dampaknya bagi Pembangunan daerah, Penyelenggaraan proses pajak yang transparan, Membuat rencana kerja yang jelas dan terperinci, Membangun Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan pelatihan di luar Kabupaten Morowali, Membuat kebijakan insentif dengan memberikan reward kepada mereka yang berhasil menyelesaikan Pendidikan dan pelatihan dengan baik, Bekerja sama dengan Lembaga atau institusi lain untuk mendapatkan sumber daya tambahan, Membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan sosial, serta menegakkan hukum yang konsisten

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga dilakukan pada fokus dan lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori Optimalisasi Sutedi 2008

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai Optimalisasi Pendapatan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan sukses.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bustamar, A. (2017). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W., & Winter, R. J. (2018). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 5e + Winter: A Crash Course in Statistics*. London: Sage Publications.
- Cahyati, Annisa Fatin Nur. (2023). *Optimalisasi pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi*.
- Keuis Rahmayanti. (2019). *Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Banjar*.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan (Revision)*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mariz, Andung Kurnia (2011) *Optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame Dalam Kaitannya dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro : Studi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Bojonegoro*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
- Mukti, Rakhman (2010). *Optimalisasi pemungutan pajak reklame sebagai upaya untuk memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Pemkot*

Malang

- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Daerah Morowali. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame*. Morowali: Pemerintah Daerah Morowali.
- Pemerintah Kabupaten Morowali. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah RI. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pemerintah RI. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Pemerintah RI. (2004). *Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- Pemerintah RI. (2009). *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Pemerintah RI. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI. (2020). *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI. (2022). *Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Prasetyo, R. A., Masitoh, E., & Dewi, R. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Karanganyar*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ramadan, Y. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Dan Transparan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Akademika*, 15(1), 1–12.
- Ria Ariani Prasetyo, Endang Masitoh, & Riana Dewi (2017) yang berjudul Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Karanganyar
- Sony, D., & Siti, K. R. (2006). *Perpajakan(Konsep, Teori dan Isu) Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sutedi, A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanti Afriyanti. (2023). *Optimalisasi Potensi Pajak Reklame Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo*
- Uly, T., & Fajriana, I. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Palembang Tahun 2013-2017*. Palembang: STIE MDP.
- Wijayanti, R., Askandar, N. S., & Amin, M. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Malang (Studi Kasus Di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(2), 14–27.
- Winardi. (1996). *Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour)*. Bandung: Tarsito.